



KOMISI A TEGAS KAWAL PENEGAKAN ATURAN Hentikan Sementara Izin Penggunaan Aset, Bongkar Reklame Melanggar



YOGYA (KR) - Komisi A DPRD Kota Yogya sebagai salah satu alat kelengkapan dewan menunjukkan komitmennya dalam mengawal penegakan aturan. Kali ini berkaitan keberadaan reklame yang melanggar atau tidak sesuai ketentuan. Terutama untuk menghentikan sementara permohonan izin penggunaan aset serta membongkar reklame melanggar.

Ketua Komisi A DPRD Kota Yogya Susanto Dwi Antoro, mengungkapkan sejak awal jajarannya memiliki perhatian besar terkait penegakan aturan yang menjadi tugas pokok dan fungsi komisinya. "Kami si-

dah memetakan dan tahap awal fokus terhadap reklame. Selanjutnya menara telekomunikasi, hotel dan kegiatan lain yang diatur melalui payung hukum," tandasnya.

Toro, sapaan akrabnya, menambahkan dalam pertemuan terakhir bersama tim eksekutif terdapat 335 titik reklame yang tersebar di berbagai sudut Kota Yogya. Dari jumlah itu ada 51 reklame melanggar yang dalam tahap penertiban. Sebanyak 13 titik reklame di antaranya sudah berhasil dibongkar baik secara mandiri maupun pembongkaran paksa. Bentuk pelanggaran reklame cukup bervariasi mulai dari tidak mengantongi izin, tidak membayar retribusi hingga berdiri di kawasan larangan.

Terhadap puluhan reklame melanggar tersebut, prosedur penertiban juga sudah dilakukan melalui surat pemberitahuan. Bagi yang tidak mengindahkan atau membandel, maka konsekuensi pembongkaran harus diterima. "Kami ti-



KR-Ardhi Wahdan
Ketua Komisi A, Susanto Dwi Antoro.



KR-Ardhi Wahdan
Sekretaris Komisi A, Rendra Akbar Ishmata



KR-Istimewa
Wakil Ketua Komisi A, Indaruwanto Eko Cahyono

dak pandang bulu itu milik siapa atau dibacking oleh siapa. Sepanjang tidak sesuai aturan ya harus menerima konsekuensinya. Makanya kami ingin mem-bersamai 100 hari kepemimpinan Hasto-Wawan agar selama itu permohonan izin penggunaan aset Pemkot untuk reklame agar dihentikan sementara," tegas Toro.

Dari proses penegakan tersebut diprediksi ada kehilangan pendapatan pajak

reklame hingga Rp 4 miliar. Akan tetapi jika tahun ini semua sudah tertib aturan maka proyeksi pendapatan bisa meningkat hingga Rp 16 miliar. Upaya itu pun sama sekali bukan untuk mengganggu iklim investasi di Kota Yogya melainkan sebaliknya. Jika semua taat prosedur tanpa ada yang diistimewakan maka investor justru akan lebih tertarik karena transparansi dan akuntabilitas menjadi terjaga.

Bahkan, imbuh Toro,

bukan untuk membuat ga-duh iklim investasi. Seba-liknya, investasi akan menggeliat mana kala aturan dapat ditegakkan secara konsisten. Hal ini karena akan membuat kegiatan masyarakat semakin ter-ukur, tertata dan tertib. "Itu nanti akan linier dengan perijinan. Reklame melang-gar bukan bagian dari investasi. Silakan berinvestasi namun harus taat aturan. Kami pun akan meminta instansi terkait untuk mempermudah perijinan," urainya.

Oleh karena itu, Ndaru sapaan akrabnya akan memberikan dukungan kepada Sat Pol PP selaku penegak aturan di tingkat eksekutif. Terutama me-nambah alokasi anggaran untuk pembongkaran reklame melanggar. Bahkan ketika Sat Pol PP menemui kendala teknis dalam pe-negakan reklame, jajaran Komisi A siap berada di garis terdepan untuk mem-berikan dukungan. "Kami juga menyoroti keberadaan reklame yang dipampang

logo aparat penegak hu-kum. Kalau itu iklan layanan masyarakat mungkin tidak menjadi persoalan, namun jika itu dikomersialkan dan tidak berijin harus ada lang-kah penertiban," katanya.

Sedangkan Sekretaris Komisi A DPRD Kota Yogya R Candra Akbar Ishmata, menuturkan kepemimpinan baru di Kota Yogya menjadi momentum yang tepat untuk menempatkan segala sesuatunya pada pedoman aturan yang berlaku. Sehingga dalam 100 hari Hasto-Wawan pihaknya turut memberikan dukun-gan terhadap aspek pe-negakan reklame. Hal ini agar jangan sampai Kota Yogya menjadi hutan reklame hingga persoalan menjadi semakin pelik.

Dirinya pun kembali menegaskan, Komisi A tidak akan tebang pilih terhadap siapa di balik pendirian reklame. Sepanjang tidak patuh terhadap aturan maka harus ditertibkan tanpa pandang bulu. (Dh)



Papan reklame di kawasan Kridosono yang dalam tahap penertiban.



Jajaran Komisi A menjalankan fungsi pengawasan atas reklame.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005